

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi landasan utama atau payung hukum dalam kaitannya status keistimewaan Yogyakarta. Status istimewa ini tersemat disebabkan oleh faktor historis panjang mengenai eksistensi dan legitimasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Status tersebut sekaligus sebagai bentuk implikasi logis hadirnya penerapan konsep desentralisasi asimetris atau otonomi khusus di Indonesia yang berdasarkan pada amanat konstitusi amandemen kedua utamanya dalam Pasal 18. Implikasi lain dari konsep otonomi khusus ini adalah pemberian *support* fiskal tambahan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan karakteristik kekhususan daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kebijakan alokasi Dana Keistimewaan sebagai instrumen guna mewujudkan urusan keistimewaan khususnya pada sektor kebudayaan yang menjadi urusan konkuren pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian ini difokuskan dengan melihat keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dan disesuaikan melalui analisa peraturan perundang-undangan (*legal research*) yang berlaku.

Urusan sektor kebudayaan dalam bingkai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas dibanding urusan pada sektor tata cara pengisian jabatan, kelembagaan, pertanahan, maupun tata ruang, baik dari segi postur pendanaan maupun program dan kegiatan. Rasio terbesar dari pagu anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta yang dialokasikan pada urusan sektor kebudayaan mencapai hampir 70% lebih dari total Dana Keistimewaan. Hal tersebut didasarkan pada tata nilai budaya yang nyaris dapat menyentuh segala lini dan aspek kehidupan manusia. Budaya dalam konteks Keistimewaan Yogyakarta, seakan telah dianggap sebagai ruh bagi seluruh gerak langkah dan kehidupan masyarakat Yogyakarta yang bermuatan tentang trilogi filosofi Yogyakarta, *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti*.

Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris; Dana Keistimewaan; Kebudayaan; Otonomi Daerah.

ABSTRACT

Law Number 13 of 2012 concerning Specialties of the Special Region of Yogyakarta serves as the main legal foundation regarding the special status of Yogyakarta. This special status is attributed to the long historical factors concerning the existence and legitimacy of the Special Region of Yogyakarta. This status is also a logical implication of the implementation of the asymmetric decentralization or special autonomy concept in Indonesia, primarily based on the mandate of the second amendment of the constitution, especially in Article 18. Another implication of this special autonomy concept is the provision of additional fiscal support aimed at preserving and maintaining the unique characteristics of these regions. The purpose of this study is to examine the policy of allocating Special Funds as an instrument to realize special affairs, especially in the cultural sector, which is a concurrent government affair.

This research uses an empirical juridical approach, conducted through literature review and field research. The research is focused on looking at the application of law in the order of social life which is realized and adjusted through analysis of applicable laws and regulations (legal research).

The cultural sector affairs within the framework of the Special Region of Yogyakarta occupy the top position compared to affairs in the sector of procedures for filling positions, institutions, land, and spatial planning, both in terms of funding posture and programs and activities. The highest ratio of the budget of the Yogyakarta Special Region Cultural Fund allocated to the cultural sector reaches almost 70% of the total Cultural Fund. This is based on cultural values that can almost touch all lines and aspects of human life. Culture in the context of Yogyakarta's Special Region, is considered the soul for all movements and lives of the Yogyakarta community, which carries the trilogy philosophy of Yogyakarta, Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti.

Keywords: *Asymmetric Decentralization; Special Funds; Culture, Regional Autonomy.*